

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Anggaran Tahun 2021
Kantor Camat Sutera

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021



KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Sutera ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Surantih, Januari 2022

Camat Sutera

KABUPATEN PESISIR SELATAN



SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP, M.Si

Pembina Tk I, IV/B

NIP.19780215 199802 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	7
2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan kegiatan Perangkat Daerah	7
2.2 Kebijakan Strategis	18
2.3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPj Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021	19
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	20
3.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	20
3.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	20
BAB IV PENUTUP	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan LKPj Tahun 2021 didasarkan atas amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LKPj memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

LKPj Kantor Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan ATA. 2021 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pelaksanaan Kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan NomorTahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023 dan Perencanaan Tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 serta Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

LKPj Kantor Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan ATA.2021 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sumatera Barat,yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumatera Barat.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPjKantor Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumatera Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor....Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan NomorTahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
27. Peraturan Bupati Nomor.... Tahun 2021 tentang Perubahanan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan Penyusunan LKPj Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Penyusunan LKPj Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dimaksudkan sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, dan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Kecamatan Sutera yang professional dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sekaligus pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di nagari dalam Kecamatan Sutera.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan LKPJ Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2021 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN SUTERA

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Jumlah Belanja langsung untuk Urusan Kewilayahan pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.891.522.882 dengan realisasi Rp. 1.714.818.362 dengan tingkat realisasi mencapai angka **90,66%** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
KecamatanSutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kewilayahan	Kantor Kecamatan Sutera	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 2. Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2020; 3. Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	persen	100	90,66	1.891.522.882	1.714.818.362
				Kegiatan Perencanaan,	Persentase sinkronisasi	persen	0	0	7.571.500	0

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah					
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	dokumen	2	2	3.821.500	0
				2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	dokumen	5	5	3.750.000	0
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	persen	100	97,71	1.638.195.933	1.486.039.476
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan	-	-	90,41	1.587.195.933	1.435.039.476
				2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honor ASN yang dibayarkan	-	-	100	51.000.000	51.000.000
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100	96,68	121.842.111	117.798.500
				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan;	jenis	5	5	1.845.800	1.823.000

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	-	-	-	-
				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	-	99,35	20.604.501	20.471.000
				4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	-	-	75,92	8.432.310	6.402.000
				5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	-	-	50,00	1.800.000,-	900.000
				6. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan pelayanan tamu	-	-	99,02	6.044.500	5.985.000
				7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	-	-	98,92	83.115.000	82.217.500
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	94,72	60.057.298	56.883.886
				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tagihan PLN yang dibayarkan	bulan	12	12	7.139.238	6.050.886

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang	6	6	52.918.060	50.833.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	persen	100	93.56	57.821.440	54.096.500
				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional	-	-	92,92	52.621.440	48.896.500
				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	5	5	2.200.000,-	2.200.000
				3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	unit	1	1	3.000.000	3.000.000
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan	persen	95	91	88.475.000	81.067.000

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	persen	95	91	88.475.000	81.067.000
				1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah rekomendasi perizinan yang difasilitasi	rekomen dasi	-	56,35	3.505.000	1.975.000
				2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah permohonan Non perizinan yang difasilitasi	rekomen dasi	-	46,71	2.355.000	1.100.000
				3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah ketersediaan operasional penanganan covid 19	bulan	12	12	82.615.000	77.992.000
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	persen	90	88,64	32.785.000	29.059.500
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan	Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan	persen	90	88,64	32.785.000	29.059.500

No	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Pemberdayaan Desa	pemberdayaan					
				1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang nagari yang sesuai dengan prioritas	usulan	-	-	16.210.000	14.335.000
				2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi lembaga sosial (PKK) yang dibina	lembaga	4	4	16.575.000	14.724.500
					Jumlah fasilitasi produk unggulan yang dibina	produk	4	4		
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penugasan terkait Urusan Pemerintahan Umum	persen	85	84,04	24.751.000	20.801.500
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi dan kordinasi yang dilaksanakan	persen	85	84,04	24.751.000	20.801.500

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah Pelaksanaan PHBN	Kali	1	1	16.891.000	16.491.500
				2. Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam Pilwana	Nagari	3	3	4.460.000	4.310.000
				3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat Koordinasi yang dilaksanakan	Bulan	12	12	3.400.000	0
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik	Nagari	12	12	15.505.000	15.505.000
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi	Nagari	12	12	15.505.000	15.505.000

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan yang baik	Nagari	12	12	15.505.000	14.339.500

Tabel 2.2
Sasaran Strategis PK Kepala OPD Kecamatan Sutera Tahun 2021.

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Sutera	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Sutera	BB	-	-
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	85%	85%	100%
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
3	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari berkinerja baik	12 Nagari	12 Nagari	100

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Camat Sutera Tahun 2021.

1. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Sutera, dengan indikator kinerja yaitu:

a. Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Silaut
(Target Kinerja :A) (Realisasi Kinerja : -)

Salah satu indikator kinerja adalah Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Sutera Tahun 2021. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:

(1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

(2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
- b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

(3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e) Fasilitas Kunjungan Tamu
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

(4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- (5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Sutera.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan dengan indikator kinerja yaitu:

a. Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.

(Target Kinerja :85%) (Realisasi Kinerja : 85%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pelayanan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan
 - c) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- b) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan sebagai berikut:

(1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- b) Pengembangan kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila
- c) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.

3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan indikator kinerja yaitu:

a. Jumlah Nagari berkinerja baik.

(Target Kinerja :100%) (Realisasi Kinerja : 100%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

a) Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Jumlah Nagari berkinerja baik.

2.2 Kebijakan Strategis

Tabel 2.3
Kebijakan Strategis Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	<i>N I H I L</i>		

2.3 TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN
 SELATAN ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BUPATI PESISIR SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

Tabel 2.4
 Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
 Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
 Akhir Tahun Anggaran 2021

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Perlu kiranya meningkatkan kapasitas SDM aparatur kecamatan yang pada gilirannya akan didapatkan aparatur yang professional dalam memberikana pelayanan kepada masyarakat.	Kecamatan Sutera telah melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur. Kegiatan ini dianggarkan pada Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 1.587.195.933 dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN sebesar Rp.51.000.000.-	Aparatur yang professional
2	Anggaran kecamatan masih kurang, kami sarankan tahun depan ditambah sehingga tugas sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan social kemasyarakatan bisa berjalan maksimal dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari	Kecamatan Sutera telah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah Desa/nagari. Kegiatan ini anggarakan pada Program Fasilitasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa/Nagari sebesar Rp.15.505.000	Pembinaan/Evaluasi di 12 Desa/ Nagari
3	Masih banyak ditemukan pemerintahan nagari dalam menyusun APB Nagari tidak sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada, untuk itu diminta perangkat daerah terkait untuk dapat melakukan pembinaan	Kecamatan Sutera telah membentuk Tim Evaluasi dan Monitoring tentang APBNagari yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Sutera. Kegiatan ini dianggarkan pada ProgramPembinaan danFasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari sebesar Rp.15.505.000	Tersusunnya APBNagari

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1 IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH TINGKAT DIATASNYA

Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Daerah atau Pusat dalam melaksanakan urusan tertentu.

Tabel 3.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYE RAPAN (%)
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2					
3					
Total					

3.2 IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH ANDIBAWAHNYA TINGKATAN

Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Nagari dalam melaksanakan urusan tertentu.

Tabel 3.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Penugasan Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYE RAPAN (%)
1	NIHIL				
2					
3					
Total					

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1 IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH TINGKAT DIATASNYA

Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Daerah atau Pusat dalam melaksanakan urusan tertentu.

Tabel 3.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYE RAPAN (%)
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2					
3	Total				

3.2 IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBERIKAN KEPADA TINGKATAN PEMERINTAHAN DI BAWAHNYA

Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Nagari dalam melaksanakan urusan tertentu.

Tabel 3.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Penugasan Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYE RAPAN (%)
1	NIHIL				
2					
3	Total				

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme

penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Kantor Camat Sutera Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja Pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

Surantih, Januari 2022

CAMAT SUERA

KABUPATEN PESISIR SELATAN



SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP, M.Si

Pembina Tk I, IV/B

NIP. 19780215 199802 1 001